

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 - 2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
I	TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	<p>Menggambarkan kontribusi/<i>share</i> sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta sektor Jasa lainnya dalam struktur perekonomian daerah yang tergambar dalam PDRB</p> <p>Formula:</p> $= \frac{PDRB \text{ Sektor Gabungan}}{Total PDRB} \times 100$ <p>Ket: PDRB Sektor Gabungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; • Sektor Industri Pengolahan; • Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; • Sektor Transportasi dan Pergudangan; • Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; • Sektor Jasa lainnya <p>Sumber data: BPS</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Persentase Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	Mengambarkan kinerja sektor Industri Pengolahan secara khusus dari tahun ke tahun Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sektor } i \text{ tahun } t - (tahun t - 1)}{PDRB \text{ Sektor } i \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Ket: Sektor i: Sektor Industri Pengolahan Sumber data: BPS
1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang	%	Mengambarkan Pertumbuhan Ekonomi, kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan termasuk Sektor Pertambangan dan Penggalian Formula: $= \frac{PDRB \text{ dengan tambang tahun } t - (tahun t - 1)}{PDRB \text{ dengan tambang tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS
		Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	Mengambarkan Pertumbuhan Ekonomi, kinerja perekonomian daerah dengan tidak memasukkan Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam perhitungannya Formula: $= \frac{PDRB \text{ non tambang tahun } t - (tahun t - 1)}{PDRB \text{ non tambang tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Menggambarkan jumlah pengangguran yang dibandingkan dengan jumlah Angkatan Kerja Formula: $= \frac{Jumlah \text{ Pengangguran}}{Jumlah \text{ Angkatan Kerja}} \times 100$ Sumber data: BPS

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN	
(1)	(2)	(3)	(4)		
II	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	<p>Mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar (Angka Harapan Hidup (dimensi kesehatan), Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah (dimensi pengetahuan), Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (dimensi hidup layak))</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>Sumber data: BPS</p>	
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	tahun	<p>Menggambarkan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)$ <p>Sumber data: BPS</p>
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	<p>Menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p> $HLS = FK \times \sum_{i=0}^n \frac{b_i}{p_i}$ <p>Sumber data: BPS</p>
			Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	<p>Menggambarkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
				x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya Formula: Dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur Sumber data: BPS
		Angka Kematian Ibu (AKI)	angka	Menggambarkan kejadian kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup Formula: $= \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000 \text{ KH}$ Sumber data: Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	angka	Menggambarkan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, setiap 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu Formula: $= \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1.000 \text{ KH}$ Sumber data: Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	point	Menjelaskan tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat Formula: <i>IPLM = (Jumlah seluruh variabel komponen pembentuk Indeks UPLM / jumlah populasi (AM) sesuai segmentasi lokus atau jenis perpustakaan) X 100.</i>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Persentase Kota Kreatif	%	<p>Sumber data: Perpustakaan Nasional</p> <p>Menggambarkan kota dimana orang-orang dapat berpikir, merencanakan, dan bertindak secara kreatif di dalam kota. Dalam konteks Kota Kreatif, Ibu Kota di masing-masing Kabupaten/Kota dapat didorong cikal bakal dan berpeluang menjadi Kota Kreatif dengan Kategori yang mencakup 3 Aspek yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan pengembangan potensi Ekonomi Kreatif 2. Pemeliharaan Creative Class (golongan atau individu kreatif) 3. Perencanaan dan pengembangan lingkungan kreatif <p>✓ Ekonomi kreatif diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi b) Menciptakan iklim bisnis yang positif c) Mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya yang terbarukan d) Menciptakan inovasi dan kreativitas sebagai keunggulan kompetitif suatu wilayah e) Membangun citra dan identitas bangsa f) Memberikan dampak sosial yang positif <p>✓ Creative Class adalah mereka yang bergerak dalam 14 subsektor, yaitu subsektor periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, dan riset dan pengembangan.</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	point	<p>✓ Lingkungan kreatif (creative environment) adalah wadah/ruang bagi manusia untuk mengekspresikan kreatifitasnya. Lingkungan kreatif berkaitan erat dengan prasyarat fisik/infrastruktur yang disediakan untuk mendukung kreativitas seseorang dapat berupa hard infrastructure maupun soft infrastructure. Hard. Contoh dari hard infrastructure adalah ruang terbuka (open space), museum, galeri dan perpustakaan, serta ruang pertunjukan (performing space). Sedangkan untuk soft infrastructure merupakan suatu bentuk fasilitas yang disediakan namun tidak dapat dilihat wujud nyatanya, biasanya soft infrastructure dapat berupa jaringan (network). Jaringan itu sendiri dapat berupa forum sosial media, komunitas blogger, dsb.</p> <p>Memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor</p> <p>Formula:</p> $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks I_j)$ <p>Ket:</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
				<p>IPK: Indeks Pembangunan Kebudayaan Dj: Dimensi ke-j Wj: Bobot Dimensi ke-j</p> <p>Sumber data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>
		Persentase penurunan konflik SARA	%	<p>Menggambarkan tingkat penurunan kejadian konflik social yang berkaitan dengan isu-isu SARA</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah Konflik SARA yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Konflik SARA}} \times 100$ <p>Sumber data: Bakesbangpoldagri</p>
III	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	<p>Menggambarkan kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.</p> <p>Formula:</p> $IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <p>Ket:</p> <p>IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKAL: Indeks Kualitas Air Laut</p> <p>Sumber data: Kementerian LHK</p>
4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	<p>Menggambarkan emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer</p> <p>Formula: Dihitung secara otomatis dalam aplikasi AKSARA Bappenas RI, sebagai himpunan/penjumlahan dari semua emisi gas, setelah diinput dalam aplikasi oleh operator pada masing-masing daerah</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
				Sumber data: Aplikasi AKSARA Bappenas RI
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	point	Memberikan informasi mengenai tingkat risiko bencana pada suatu wilayah Formula: $IRB = \frac{Hazard \times Vulnerability}{Capacity}$ Sumber data: BNPB
		Bauran Energi Baru Terbarukan	%	Menggambarkan kontribusi konsumsi energi terbarukan terhadap konsumsi energi final Formula: $= \frac{Konsumsi\ Energi\ Terbarukan}{Konsumsi\ Energi\ Final} \times 100$ Sumber data: Kementerian ESDM
5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	Rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi $IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ Ket: TL: Tutupan Lahan Sumber data: Kementerian LHK
		Indeks Kualitas Air (IKA)	point	Menggambarkan kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya Formula: $IKA = ((Status\ mutu\ Lokasi\ 1 \times bobot\ pencemaran) + \dots + (Status\ mutu\ Lokasi\ n \times bobot\ pencemaran))$ Sumber data: Kementerian LHK
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	point	Menggambarkan kondisi kualitas udara di suatu tempat

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
				Formula: $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (J_{SU} - 0,1) \right)$ $I_{KJ} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } \bar{E}_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } \bar{E}_u}$ Sumber data: Kementerian LHK
IV	TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI	Angka Kemiskinan	%	Menggambarkan jumlah penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan Formula: $P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ Ket: a = 0 z = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. Sumber data: BPS

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
		Jumlah Kemiskinan Ekstrem	%	Menggambarkan kondisi Penduduk Miskin yang berada pada desil 1, 2, dan 3 Formula: Menjumlahkan penduduk miskin yang ada pada desil 1, desil 2, dan desil 3. Sumber data: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		Gini Rasio	angka	Menggambarkan Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Formula: $G = 1 - \sum_{i=1}^n F_i^2 Q_i$ dimana: F _i = jumlah penduduk atau penduduk pada kelas ke i Q _i = persentase kumulatif total penduduk atau penduduk sampai kelas ke i Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika: 0 < G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi Sumber data: BPS
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	point	Menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dalam 4 dimensi yakni: 1. Dimensi pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja 2. Dimensi pemerataan kesempatan kerja 3. Dimensi perlindungan tenaga kerja 4. Dimensi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Formula: Dengan menjumlahkan indeks 9 Indikator Utama Nasional maupun di suatu Provinsi yakni:

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
				1. Perencanaan Tenaga Kerja 2. Penduduk dan Tenaga Kerja 3. Kesempatan Kerja 4. Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja 5. Indeks Produktivitas Tenaga Kerja 6. Hubungan Industrial 7. Kondisi Lingkungan Kerja 8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja 9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sumber data: Kementerian dan Ketenagakerjaan
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	point	Menggambarkan kondisi ketahanan pangan secara umum pada suatu wilayah. $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Ket: i: Indikator 1, ..., 9 j: Kabupaten 1, 2,; Kota 1, 2, Y _j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j a _i : Bobot masing-masing indikator ke-i X _{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Sumber data: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI
		Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	point	Menggambarkan capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif yaitu a. Kebutuhan fisiologis meliputi: Penghasilan dan perumahan, Kesehatan, Hak-hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
				<p>b. Keamanan keselamatan mencakup Keamanan fisik dan politik, Keamanan ekonomi terkait dengan pendidikan /keterampilan dan keamanan pekerjaan Lingkungan fisik</p> <p>c. Kegiatan individu yang dihargai meliputi Otonomi dan kebebasan</p> <p>d. Keterkaitan-milik meliputi Interaksi Sosial dan Hak-hak dasar social</p> <p>e. Kompetensi dan harga diri mencakup Kompetensi dan harga diri</p> <p>Formula: Nilai indeks kesejahteraan sosial dihitung dengan cara sebagai berikut: $(a \times 0,2) + (b \times 0,2) + (c \times 0,2) + (d \times 0,2) + (e \times 0,2) = \text{Nilai Indeks } X$. Dengan demikian nilai indeks (x) hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai Indeks setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y Sumber data: OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)</p>
		Indeks Demokrasi	point	<p>Menggambarkan secara obyektif dan empirik kondisi demokrasi politik di Indonesia, yang terdiri dari tiga aspek yakni: aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga-Lembaga Demokrasi</p> <p>Formula: <i>Dihitung dengan lima macam data yang digunakan untuk membangun indeks. Tiga set data pertama adalah data kuantitatif yang berasal dari review surat kabar dan review dokumen, serta portal berita online, dua</i></p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
				set data berikutnya bersifat kualitatif yang berasal dari FGD dan wawancara mendalam Sumber data: BPS
7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat Inflasi	%	Menggambarkan tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat secara umum Formula: <i>Dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disurvei dan dihitung BPS. Perubahan IHK dari waktu ke waktu merupakan inflasi yang terjadi</i> Sumber data: BPS
		Persentase Jaminan Sosial Kesehatan/ <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>	%	Menggambarkan penjaminan kesehatan masyarakat yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Formula: $= \frac{\text{Jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ Sumber data: Dinas Kesehatan
		Persentase Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	Menggambarkan tenaga kerja yang memperoleh Jaminan Sosial Formula: $= \frac{\text{TK yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah TK}} \times 100$ Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Pendapatan per Kapita	rupiah	Menggambarkan jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis Formula:

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
	(1)		(2)	(3)	(4)
					$= \frac{\text{Pendapatan per Kapita tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Pendapatan per Kapita tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: BPS</p>
			Tingkat Literasi Keuangan	%	<p>Menggambarkan tingkat pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence) yang mempengaruhi sikap (attitude), dan perilaku keuangan (behaviour) seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.</p> <p>Formula: Perhitungan dilakukan dengan survei yang dilakukan secara langsung/ wawancara tatap muka dibantu dengan sistem <i>Computer Asisted Personal Interviewing (CAPI)</i></p> <p>Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan</p>
V	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks Reformasi Birokrasi	point	<p>Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Formula: <i>Pengukuran dilakukan oleh Kemenpan RB dengan bidang diantaranya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Pengungkit 60%, terdiri dari aspek manajemen perubahan, penataan perundangan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan publik.</i> <i>Hasil (40%), terdiri dari aspek pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintah efektif dan efisien, pemerintah dengan pelayanan publik yang berkualitas</i>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
				Sumber data: Kementerian PAN dan RB RI
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Kategori atau Nilai	<p>Menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik, terpercaya, dan inklusif.</p> <p>Formula:</p> <p>(1) <i>Perencanaan Kinerja – Bobot (30)</i> (2) <i>Pengukuran Kinerja – Bobot (30)</i> (3) <i>Pelaporan Kinerja – Bobot (15)</i> (4) <i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal – Bobot (25)</i></p> <p>Sumber data: PermenPANRB 88 Tahun 2021</p>
9	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	<p>Menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri program dan kegiatan dalam pembangunan daerah</p> <p>Formula:</p> $RFKD = \frac{KFD}{\text{Belanja Pegawai}}$ <p>Ket. RFKD: Rasio Kapasitas Fiskal Daerah KFD: Kapasitas Fiskal Daerah Sumber data: Kementerian Keuangan RI</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
VI	TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)	Persentase Capaian Indikator SDGs	%	Menggambarkan capaian indikator SDGs merupakan jumlah indikator SDGs yang tercapai dibandingkan jumlah seluruh target indikator SDGs Formula: $= \frac{\text{Jumlah indikator SDGs yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator SDGs}} \times 100$ Sumber data: Laporan SDGs Bappeda Provinsi NTB
10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	Menggambarkan capaian indikator SDGs Pilar Pembangunan Sosial merupakan jumlah indikator yang tercapai dibandingkan jumlah seluruh target indikator pada pilar pembangunan social Formula: $= \frac{\text{Jumlah indikator SDGs pilar sosial yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator SDGs pilar sosial}} \times 100$ Sumber data: Laporan SDGs Bappeda Provinsi NTB
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	Menggambarkan capaian indikator SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi merupakan jumlah indikator yang tercapai dibandingkan jumlah seluruh target indikator pada pilar pembangunan ekonomi Formula: $= \frac{\text{Jumlah indikator SDGs pilar ekonomi yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator SDGs pilar ekonomi}} \times 100$ Sumber data: Laporan SDGs Bappeda Provinsi NTB
		Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	Menggambarkan capaian indikator SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan merupakan jumlah indikator yang tercapai dibandingkan jumlah seluruh target indikator pada pilar pembangunan lingkungan Formula:

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
	(1)		(2)	(3)	(4)
					$= \frac{\text{Jumlah indikator SDGs pilar lingkungan yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator SDGs pilar lingkungan}} \times 100$ <p>Sumber data: Laporan SDGs Bappeda Provinsi NTB</p>
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	<p>Menggambarkan capaian indikator SDGs Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola merupakan jumlah indikator yang tercapai dibandingkan jumlah seluruh target indikator pada pilar pembangunan hukum dan tata Kelola</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah indikator SDGs Pilar hukum yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator SDGs Pilar hukum}} \times 100$ <p>Sumber data: Laporan SDGs Bappeda Provinsi NTB</p>
VII	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	point	<p>Menggambarkan 4 aspek dalam daya saing daerah yakni: 1. Lingkungan Pendukung; 2. Sumber Daya Manusia; 3. Pasar; 4. Ekosistem Inovasi.</p> <p>Formula:</p> <p><i>Pengukuran dilakukan oleh BRIN, IDSD 2022 hanya dapat menampilkan skor untuk daerah yang datanya lengkap pada seluruh indikator. Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 62 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota.</i></p> <p>Sumber data: BRIN</p>
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan,	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	point	<p>Menggambarkan tingkat kepuasan layanan terhadap indikator infrastruktur dengan melihat 5 aspek yakni: Aspek ketersediaan, kualitas, kesesuaian, kemanfaatan dan dampak ekonomi</p> <p>Formula:</p>

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
	mendorong investasi dan percepatan industrialisasi			$IKLI = \frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sumber data: Dinas PUPR</p>
12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio Konektivitas	%	<p>Menggambarkan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara</p> <p>Formula: <i>Menghitung Jumlah trayek tahun n-1 + Realisasi jumlah trayek tahun n) / target s.d tahun n) x100</i></p> <p>Sumber data: Dinas Perhubungan</p>
13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	<p>Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>Formula: <i>Perhitungan dilakukan dengan sistem berbasis web pada situs resmi kemendagri</i></p> <p>Sumber data: Kementerian Dalam Negeri RI</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH